

Pengaruh Rasio Efisiensi Dan Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Periode 2012 – 2022)

Vio Dyah Pitaloka Rahmadani^{1*}, Agus Supriatna²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Email : ^{1*}viodpr8@gmail.com, ²dosen01837@unpam.ac.id

(* : coressponding author)

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2022 baik secara parsial maupun simultan. Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi sampel yang digunakan adalah Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menggunakan Purpose Sampling dan teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS versi. 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan dengan nilai hasil Uji t diperoleh thitung $-1,137 < t_{tabel} 2,262$ dengan nilai signifikan $(0,293 > 0,05)$. Rasio Kemandirian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan dengan nilai hasil Uji t diperoleh thitung $-2,865 < t_{tabel} 2,262$ dengan nilai signifikan $(0,024 < 0,05)$. Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan dengan nilai hasil Uji f diperoleh nilai $(0,036 < 0,05)$. Berdasarkan nilai Uji Koefisien Determinasi R² besarnya nilai diperoleh sebesar 50,2% sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji Hipotesis diperoleh nilai Fhitung $5,540 > F_{tabel} 4,46$.

Kata Kunci: Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Terhadap Rasio Pertumbuhan

Abstract - This research aims to determine the influence of Efficiency Ratio and Independence Ratio on Regional Financial Growth Ratio within the DKI Jakarta Provincial Government for the 2012-2022 period both partially and simultaneously. The method in this research is Quantitative. The sample population used is purpose sampling and data analysis techniques with multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The research results showed that partially, the Efficiency Ratio had no significant effect on the Growth Ratio with the value of the t test results obtained $t_{count} -1,137 < t_{table} 2,262$ with a significant value $(0,293 > 0,05)$. The Independence Ratio partially has a significant effect on the Growth Ratio with the value of the t test result obtained $t_{count} -2,865 < t_{table} 2,262$ with a significant value $(0,024 < 0,05)$. Efficiency Ratio and Growth Ratio simultaneously have a significant effect on the Growth Ratio with the value of the F test results obtained value $(0,036 < 0,05)$. Based on the value of the R² Determination Coefficient Test, the value obtained is 50,2% while the remaining 49,8% is influenced by othe factors. Hypothesis Test obtained Fcount $5,540 > F_{table} 4,46$.

Keywords: Efficiency Ratio, and Independence Ratio to Growth Ratio.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Sukirno (2008 : 423) pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dengan perekonomian yang terus tumbuh maka kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat akan semakin baik.

Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Hariadi (2014 : 7) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pengelolaan

kuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya tidak mencapai tujuan. Kinerja yang dimaksud seperti kendala di daerah DKI Jakarta yaitu seperti banjir, macet, sulitnya air bersih, dan lain-lain. Apabila pemerintah mampu untuk menanggulangnya, maka kinerja pemerintah sangat bagus.

DKI Jakarta adalah salah satu kota yang menjadi percontohan bagi seluruh daerah di Indonesia, karena kotanya yang terbilang sangat modern dan indah, hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata lokal dan mancanegara, sehingga DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hamzah (2008) menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam kinerja keuangan pada masing-masing daerah yang berbeda. Perbedaan kinerja disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya.

Maka dari itu, permasalahan tersebut perlu memakan banyak biaya. Untuk bisa mengatasinya, pemerintah daerah harus mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Agar meminimalisasi kerugian daerah, diperlukan pengendalian keuangan daerah dengan melihat cara pengelolaan dana dari tahun ke tahun.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh signifikan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2022?
2. Apakah ada pengaruh signifikan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2022?
3. Apakah ada pengaruh signifikan rasio efisiensi dan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2022?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan rasio efisiensi dan rasio kemandirian terhadap pertumbuhan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2022.

1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Rasio yang digunakan yaitu :

1.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Efisiensi merupakan perbandingan antara Output atau Input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, menurut Mardiasmo (2002 : 4). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Realisasi Pengeluaran PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Semakin tinggi Rasio Kemandirian maka Pembangunan Daerah akan semakin maju, sehingga Pertumbuhan Ekonomi pun dapat meningkat, menurut Halim (2002). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}} \times 100\%$$

1.6 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka semakin dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Sularno dan Restianto (2011). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = r = \frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_0}{\text{PAD}_0} \times 100\%$$

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, teknik penelitian menggunakan Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Sederhana, Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Koefisien Determinasi (R²), Uji t dan Uji F. Didapatkan dari populasi Laporan Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta Periode 2012 – 2022, dengan sampel Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bantuan Pusat, Pinjaman, Jumlah Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran Biaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berikut ini adalah ringkasan Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan di Provinsi DKI Jakarta Periode 2012 – 2022 :

Tabel 1. Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan di Provinsi DKI Jakarta Periode 2012 – 2022

No.	Tahun	Rasio Efisiensi	Rasio Kemandirian	Rasio Pertumbuhan
1.	2012	0,037	0,609	0,0653
2.	2013	0,114	0,645	0,0611
3.	2014	0,142	0,611	0,0595
4.	2015	0,161	0,674	0,0588
5.	2016	0,123	0,673	0,0585
6.	2017	0,211	0,667	0,0622
7.	2018	0,173	0,674	0,0617
8.	2019	0,173	0,678	0,0589
9.	2020	0,112	0,665	- 0,0236
10.	2021	0,147	0,692	0,0594
11.	2022	0,099	0,827	0,0559

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2012 sampai dengan 2022 rata-rata mengalami ketidak stabilan. Dapat dilihat pada tabel Rasio Efisiensi tahun 2012 mengalami nilai paling rendah dengan nilai 0,037 yang artinya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya, sedangkan nilai tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai 0,211 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengalami tingginya jumlah belanja daerahnya.

Berdasarkan perhitungan tabel di atas Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atas bantuan dari pihak eksternal. Dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat mengalami ke stabilan di angka 0,6. Dilihat dari nilai yang paling rendah yaitu pada tahun 2012 dengan nilai 0,609, dan nilai tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan nilai 0,827, dapat diartikan tingkat kemampuan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pola hubungan partisipatif yang artinya peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah Provinsi DKI Jakarta mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan perhitungan tabel di atas Rasio Pertumbuhan pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui dari tahun 2012 sampai dengan 2022 mengalami ketidak stabilan. Pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan nilai 0,0653, artinya daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya seperti Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal. Lalu Pertumbuhan terendah dapat dilihat pada tahun 2020 dengan nilai - 0,0236, hal ini di sebabkan karena wabah pandemi covid-19 yang menyerang ke berbagai dunia termasuk Indonesia, hal ini menjadi tahun terburuk bagi daerah Provinsi DKI Jakarta karena banyak dampak negatif yang di alami.

Berikut adalah hasil Uji t, Uji F dan Uji Koefisien Determinasi :

Tabel 2. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	3.798	.333		11.403	.000					
1 Rasio Efisiensi (X1)	-.024	.021	-.272	-1.137	.293	-.398	-.395	-.267	.966	1.035
Rasio Kemandirian (X2)	-.343	.120	-.686	-2.865	.024	-.736	-.735	-.674	.966	1.035

Sumber : Pengolahan Data (2023)

- Nilai signifikan pada variabel Rasio Efisiensi (X_1) adalah sebesar 0,293 dengan nilai beta – 0,024. Diperoleh nilai signifikansi $0,293 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -1,137 < t_{tabel} 2,262$. Maka H_01 diterima dan H_{a1} ditolak. Maka dapat disimpulkan nilai sig ($0,293$) $> 0,05$ artinya variabel Rasio Efisiensi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan.
- Nilai signifikan pada variabel Rasio Kemandirian (X_2) adalah sebesar 0,024 dengan nilai beta – 0,343. Diperoleh nilai signifikansi $0,024 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -2,865 < t_{tabel} 2,262$. Maka H_02 ditolak dan H_{a2} diterima. Maka dapat disimpulkan nilai sig ($0,024$) $< 0,05$ artinya variabel Rasio Kemandirian berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan.

Tabel 3. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.002	2	.001	5.540	.036 ^b
Residual	.001	7	.000		
Total	.003	9			

Sumber : Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan hasil output olah data SPSS di tabel atas diketahui nilai signifikansi untuk Pengaruh variabel X_1 dan X_2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar $0,036 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5,540 > F_{tabel} 4,46$. Maka H_03 ditolak dan H_{a3} diterima, hal ini menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.783 ^a	.613	.502	.01297	.613	5.540	2	7	.036	1.613

Nilai Adjusted R Square yaitu 0,502 artinya 50,2% variabel Rasio Pertumbuhan dijelaskan oleh variabel independen yaitu Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian, sedangkan 49,8% (100% - 50,2%) dijelaskan oleh variabel lainnya.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang mengenai Pengaruh Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2012-2022, maka ada beberapa hal yang akan dibahas dan dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a) Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Rasio Pertumbuhan pada Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2022

Hipotesis pertama (H_1) penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial diduga Rasio Efisiensi (X_1) tidak berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan (Y) ditolak. Berdasarkan tabel hasil Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,293 dengan nilai beta -0,024 dan nilai $t_{hitung} - 1,137 < t_{tabel} 2,262$. Maka dapat disimpulkan nilai sig (0,293) $> 0,05$ artinya variabel Rasio Efisiensi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan (Y).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erlangga Pati Kawa (2011) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah”. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Rasio Efisiensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

b) Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Rasio Pertumbuhan Pada Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2022

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan secara parsial diduga Rasio Kemandirian (X_2) berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan (Y) diterima. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,024 dengan nilai beta -0,343 dan nilai $t_{hitung} -2,865 < t_{tabel} 2,262$. Maka dapat disimpulkan nilai sig (0,024) $< 0,05$ artinya variabel Rasio Kemandirian (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan (Y).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Luh Lana Putri Ani dan Dwirandra (2014) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota”. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

c) Pengaruh Secara Simultan Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Terhadap Rasio Pertumbuhan

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan diduga Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan. Dengan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,036 ($< 0,05$) dan nilai $F_{hitung} 5,540 > F_{tabel} 4,46$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan. Besarnya pengaruh Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara bersama-sama berpengaruh terhadap Rasio Pertumbuhan sebesar 50,2%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *R Square* sebesar 50,2% sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kartika Berliani (2016) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka”. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah peneliti uraikan dalam BAB I – IV di atas, yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Rasio Efisiensi (X_1) dan Rasio Kemandirian (X_2) terhadap Rasio Pertumbuhan (Y) pada Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Periode 2012-2022, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Efisiensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan pada Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012 - 2022. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Provinsi tidak mempertimbangkan kondisi Rasio Efisiensi untuk mempengaruhi Pertumbuhan Keuangan Daerahnya.
2. Rasio Kemandirian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan pada Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012 - 2022. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Provinsi mempertimbangkan kondisi Rasio Kemandirian untuk mempengaruhi Pertumbuhan Keuangan Daerahnya.
3. Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pertumbuhan pada Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012 - 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan selesainya penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Pranoto., S.E., M.M., Selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Bapak Dr. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si., Selaku Rektor Universitas Pamulang., Bapak Dr. H. Endang Ruhayat, S.E., M.M., CSRA, CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang., Bapak Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pamulang., Bapak Dr. Moh. Sutoro, S.E., M.M., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Manajemen Universitas Pamulang., Bapak Agus Supriatna S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyelesaian penelitian ini., Pihak Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang sudah mempublish data Laporan Keuangan pertahunnya., Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan, motivasi, bantuan, dan doa yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, H. F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 147–156.
- Anynda, N. S., & Hermendo, S. B. (2020). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.
- Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 1–9.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Gede, L., & Artini, S. (2017). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- Hudaya, D. B. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Mardiasmo (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Moch. Basofi Soedirman (2000). Otonomi Daerah Menuju Indonesia Baru, Semarang, Yayasan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam.
- Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, E. W. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 65–

73.

HAW. Widjaja (2002). Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ida Rosnidah (2016). Keuangan Negara dan Daerah, Yogyakarta, Deepublish.

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112.

Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.